

## METODE PENELITIAN KHUSUS UNTUK EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK: MODEL ANALISIS DAMPAK KHUSUS UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERDEPAN DAN TERLUAR DI KALIMANTAN TENGAH

Damai Alam Usop

Program Studi Magister ilmu Administrasi, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Banten 15118  
e-mail: [damaiusop@gmail.com](mailto:damaiusop@gmail.com)

**Abstrak** – Evaluasi kebijakan publik sangat krusial untuk memastikan efektivitas program pembangunan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) Kalimantan Tengah, yang memiliki karakteristik kawasan hutan luas, sungai sebagai jalur transportasi utama, serta keragaman budaya Dayak. Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan menguji model analisis dampak khusus untuk evaluasi program di daerah tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan campuran dengan desain eksplanatori urut, menggabungkan survei terhadap 300 responden dan wawancara mendalam dengan 25 informan kunci di Kabupaten Gunung Mas, Murung Raya, dan Lamandau selama 6 bulan. Model yang dikembangkan mencakup 5 dimensi utama dengan 23 indikator khusus terkait aksesibilitas layanan, dampak sosial budaya, keberlanjutan program, kapasitas lokal, dan kepuasan masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa model ini lebih efektif menangkap karakteristik unik daerah 3T dibandingkan model konvensional, serta mampu mengidentifikasi hambatan dan peluang yang tidak terdeteksi oleh evaluasi standar. Rekomendasi yang dihasilkan lebih tepat sasaran, seperti penyesuaian jadwal program dengan musim lokal dan penguatan peran Dewan Adat. Penelitian merekomendasikan penerapan model ini untuk evaluasi program pembangunan di daerah 3T Kalimantan Tengah.

**Kata Kunci:** Metode Penelitian Khusus; Evaluasi Kebijakan Publik; Daerah 3T; Kalimantan Tengah; Model Analisis Dampak.

*Abstract: Public policy evaluation is crucial to ensure the effectiveness of development programs in frontline, outermost, and underdeveloped (3T) regions of Central Kalimantan, characterized by vast forest areas, rivers as main transportation routes, and diverse Dayak cultures. This study aims to develop and test a special impact analysis model for evaluating programs in these regions. The research uses a mixed-methods approach with a sequential explanatory design, combining surveys of 300 respondents and in-depth interviews with 25 key informants in Gunung Mas, Murung Raya, and Lamandau Regencies over 6 months. The developed model includes 5 main dimensions with 23 specific indicators related to service accessibility, socio-cultural impact, program sustainability, local capacity, and community satisfaction. Results show the model is more effective in capturing unique characteristics of 3T regions compared to conventional models, and can identify barriers and opportunities not detected by standard evaluations. Recommendations are more targeted, such as adjusting program schedules to local seasons and strengthening the role of Customary Councils. The study recommends implementing this model for evaluating development programs in Central Kalimantan's 3T regions.*

**Keywords:** Special Research Methods; Public Policy Evaluation; 3T Regions; Central Kalimantan; Impact Analysis Model

### PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia dengan luas wilayah lebih dari 153.000 kilometer persegi, sebagian besar terdiri dari kawasan hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berkomitmen untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan konservasi lingkungan melalui berbagai program pembangunan strategis, terutama di 8 kabupaten yang termasuk dalam kategori daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (daerah 3T). Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021–2026, daerah 3T di provinsi ini memiliki karakteristik lokasi terpencil,

aksesibilitas terbatas, tingkat pembangunan relatif rendah, serta dominasi masyarakat suku Dayak dengan budaya dan sistem sosial yang khas.

Program pembangunan yang diimplementasikan meliputi pembangunan infrastruktur transportasi sungai dan jalan desa, pengembangan usaha ekonomi rakyat berbasis sumber daya lokal, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan di kawasan pedalaman, serta program pemberdayaan masyarakat dalam rangka konservasi hutan dan keanekaragaman hayati. Namun, implementasi program ini sering menghadapi tantangan yang kompleks dan spesifik dengan kondisi Kalimantan Tengah.

Kondisi geografis yang didominasi oleh hutan dan sungai membuat transportasi darat sangat terbatas – sebagian besar daerah hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai yang ketersediaannya bergantung pada musim air. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam distribusi bahan bantuan program, koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, serta pemantauan pelaksanaan program di lapangan. Selain itu, masyarakat suku Dayak di daerah 3T memiliki sistem sosial yang berbasis pada adat istiadat dan hukum adat (hukum lansei), yang mengatur hubungan antar masyarakat serta hubungan manusia dengan alam. Perbedaan antara sistem pembangunan pemerintah dan sistem sosial budaya lokal seringkali menjadi hambatan dalam penerimaan dan implementasi program.

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama di daerah 3T Kalimantan Tengah. Banyak aparatur pemerintah kabupaten dan kecamatan memiliki kapasitas yang terbatas dalam hal perencanaan program, manajemen data, dan evaluasi dampak program. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam proses evaluasi serta keterbatasan akses terhadap informasi membuat data yang dikumpulkan tidak selalu dapat merepresentasikan kondisi sebenarnya di lapangan.

Evaluasi kebijakan publik dan program pembangunan yang dilakukan saat ini sebagian besar menggunakan model evaluasi konvensional yang tidak disesuaikan dengan kondisi lokal. Model evaluasi tersebut biasanya berfokus pada indikator kuantitatif seperti jumlah infrastruktur yang dibangun atau jumlah peserta yang terlibat, namun gagal menangkap dampak yang lebih mendalam terhadap kehidupan masyarakat lokal. Aspek penting seperti perubahan dalam struktur sosial masyarakat Dayak, dampak program terhadap kelestarian budaya dan bahasa daerah, serta perubahan dalam kapasitas lembaga adat seringkali tidak menjadi fokus evaluasi, padahal aspek-aspek ini sangat krusial untuk menentukan keberlanjutan program pembangunan.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan metode penelitian khusus untuk evaluasi kebijakan publik di daerah 3T Kalimantan Tengah. Metode penelitian khusus ini harus mampu mengakomodasi karakteristik unik seperti ketergantungan pada jalur sungai untuk aksesibilitas, pentingnya peran lembaga adat, serta kebutuhan untuk menyeimbangkan pembangunan dengan konservasi lingkungan. Selain itu, metode penelitian ini juga harus mempertimbangkan aspek etis dalam penelitian di daerah dengan masyarakat adat.

Perkembangan metodologi penelitian di bidang administrasi publik telah menunjukkan adanya tren untuk mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan konteks lokal. Namun, pengembangan metode penelitian khusus untuk daerah 3T Kalimantan Tengah masih tergolong terbatas. Banyak penelitian tentang evaluasi kebijakan di provinsi ini masih menggunakan model evaluasi standar, sehingga hasil evaluasi tidak dapat memberikan informasi yang cukup untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Selain itu, pentingnya evaluasi yang efektif juga terkait erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama target terkait konservasi ekosistem darat, pengurangan kesenjangan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Evaluasi kebijakan publik yang menggunakan metode khusus akan membantu pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memantau kemajuan pencapaian target SDGs di daerah 3T.

Kebutuhan akan metode penelitian khusus juga semakin mendesak mengingat tantangan

yang dihadapi oleh Kalimantan Tengah, seperti perubahan iklim dan kebijakan nasional tentang konservasi hutan dan lahan gambut yang memengaruhi mata pencarian masyarakat lokal. Evaluasi kebijakan yang menggunakan metode khusus akan mampu mengidentifikasi dampak dari tantangan-tantangan ini terhadap program pembangunan dan memberikan rekomendasi yang sesuai.

Oleh karena itu, kajian tentang pengembangan dan penerapan metode penelitian khusus untuk evaluasi kebijakan publik di daerah 3T Kalimantan Tengah menjadi sangat penting dan relevan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi peneliti, praktisi kebijakan, dan aparatur pemerintah, serta berkontribusi pada pengembangan metodologi penelitian di bidang administrasi publik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) dengan desain eksplanatori urut. Tahap pertama mengumpulkan data kuantitatif melalui survei untuk mendapatkan gambaran umum tentang dampak program pembangunan di daerah 3T Kalimantan Tengah. Tahap kedua mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk menjelaskan temuan kuantitatif serta mengungkap aspek budaya dan lingkungan yang tidak dapat diukur dengan data kuantitatif. Desain ini dipilih karena mampu menggabungkan kekuatan metode kuantitatif dan kualitatif, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif sesuai dengan kondisi daerah 3T di Kalimantan Tengah (Creswell & Plano Clark, 2018).

Lokasi Penelitian dilakukan di tiga kabupaten percontohan daerah 3T di Provinsi Kalimantan Tengah: Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keragaman karakteristik daerah 3T di Kalimantan Tengah, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk daerah 3T lainnya di provinsi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penelitian khusus di daerah 3T di Kalimantan Tengah melalui beberapa aspek, yaitu:

### 1) Karakteristik Metode Penelitian Khusus Untuk Evaluasi Kebijakan Publik Di Daerah 3T Kalimantan Tengah

Berdasarkan analisis kajian pustaka dan hasil eksplorasi di lapangan, metode penelitian khusus untuk evaluasi kebijakan publik di daerah 3T Kalimantan Tengah memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

- Fleksibilitas dalam Jadwal dan Akses: Dapat disesuaikan dengan kondisi musim air yang memengaruhi jalur transportasi sungai, serta menggunakan pendekatan bertahap untuk mencapai desa-desa yang sangat terpencil.
- Pertimbangan Budaya Dayak: Memperhatikan nilai-nilai adat, norma sosial, dan peran lembaga adat dalam proses penelitian, termasuk melakukan penelitian dengan memperoleh izin dari Dewan Adat Daerah dan menggunakan bahasa serta istilah yang sesuai dengan budaya lokal.
- Integrasi Aspek Lingkungan: Mengintegrasikan indikator tentang dampak program terhadap lingkungan hutan, sungai, dan keanekaragaman hayati, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi prioritas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Keterpaduan Metode: Menggabungkan metode survei dengan metode kualitatif yang berbasis pada pengetahuan lokal ("local knowledge") untuk menangkap aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari dampak program.
- Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Adat: Melibatkan masyarakat dan lembaga adat dalam seluruh proses penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga penyajian hasil penelitian, untuk memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat lokal.

Menurut Yunus dan Prasetyo (2022), karakteristik ini sangat penting karena metode penelitian yang tidak memperhatikan kondisi khusus daerah 3T Kalimantan Tengah cenderung menghasilkan

data yang tidak akurat atau tidak relevan dengan kebutuhan pembangunan lokal. Hal ini juga sesuai dengan temuan UNDP (2022) yang menunjukkan bahwa penelitian yang melibatkan masyarakat adat dan memperhatikan kondisi lingkungan menghasilkan rekomendasi yang lebih mudah diterima dan diimplementasikan.

## 2) Pengembangan Model Analisis Dampak Khusus untuk Program Pembangunan di Daerah 3T Kalimantan Tengah

Model analisis dampak khusus yang dikembangkan dalam penelitian ini terdiri dari 5 dimensi utama dengan 23 indikator khusus yang disesuaikan dengan kondisi Kalimantan Tengah:

- a. Aksesibilitas Layanan: Jangkauan layanan melalui jalur sungai/darat, kemudahan akses bagi kelompok rentan, kesesuaian jadwal dengan musim air dan musim tanam
- b. Dampak Sosial Budaya: Dampak terhadap struktur sosial masyarakat Dayak, kelestarian bahasa dan adat istiadat, peran lembaga adat dalam pengelolaan program
- c. Keberlanjutan Program: Kemampuan masyarakat untuk melanjutkan manfaat program, dukungan lembaga lokal, kelestarian sumber daya alam, kesesuaian dengan kebijakan konservasi
- d. Kapasitas Lokal: Peningkatan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha lokal, kemampuan lembaga adat dalam mengelola sumber daya, kemandirian masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan
- e. Kepuasan Masyarakat: Kepuasan terhadap kualitas layanan, kesesuaian program dengan kebutuhan lokal, harapan terhadap program masa depan, persepsi tentang keseimbangan pembangunan dan konservasi

Proses pengembangan model ini dilakukan melalui tahapan:

- a. Tinjauan Pustaka dan Dokumen Lokal: Mengidentifikasi dimensi dan indikator yang relevan dengan evaluasi program pembangunan di Kalimantan Tengah, termasuk mempertimbangkan kebijakan gubernur tentang konservasi hutan dan pemberdayaan masyarakat adat.
- b. Fokus Group Discussion (FGD): Melakukan diskusi dengan para ahli dari Universitas Palangkaraya, praktisi kebijakan dari Pemprov Kalimantan Tengah, dan tokoh adat dari ketiga kabupaten penelitian untuk mengidentifikasi dimensi dan indikator yang sesuai dengan kondisi lokal.
- c. Uji Coba Lapangan: Menguji model yang telah dikembangkan di Kecamatan Kahayan Hilir (Kabupaten Gunung Mas) untuk mendapatkan masukan dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi lapangan.
- d. Validasi Ahli: Memvalidasi model yang telah disesuaikan dengan bantuan ahli metodologi penelitian dari Universitas Indonesia dan ahli kebijakan publik dari Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Santoso dan Wijaya (2023), pengembangan model yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan lokal dapat meningkatkan relevansi dan kelayakan model untuk digunakan di Kalimantan Tengah. Hal ini juga didukung oleh temuan Dasuki dan Hidayat (2023) yang menunjukkan bahwa model evaluasi yang dikembangkan secara lokal memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam mengidentifikasi dampak program di daerah dengan kondisi khusus.

## 3) Efektivitas Model Analisis Dampak Khusus yang Dikembangkan

Hasil pengujian model analisis dampak khusus menunjukkan bahwa model ini lebih efektif dibandingkan dengan model evaluasi konvensional dalam beberapa aspek:

- a. Kemampuan Menangkap Dampak Sosial Budaya: Model khusus mampu mengidentifikasi dampak program terhadap kelestarian budaya Dayak, seperti pelestarian upacara adat dan sistem hukum lansei, yang tidak terdeteksi oleh model konvensional. Misalnya, di Kabupaten Murung Raya, ditemukan bahwa program pengembangan usaha ekonomi rakyat yang melibatkan lembaga adat tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat peran lembaga adat dalam kehidupan masyarakat.
- b. Kemampuan Mengidentifikasi Hambatan Khusus: Model khusus mampu mengidentifikasi hambatan yang spesifik untuk daerah 3T Kalimantan Tengah, seperti kesulitan dalam distribusi bahan baku program akibat musim kemarau yang panjang, atau perbedaan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat tentang tujuan program akibat perbedaan sistem nilai. Misalnya, di Kabupaten Lamandau, ditemukan bahwa program pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan sistem drainase lokal menyebabkan kerusakan pada lahan gambut dan merusak

mata pencaharian masyarakat.

- c. Kemampuan Mengintegrasikan Aspek Lingkungan: Model khusus mampu mengidentifikasi hubungan antara program pembangunan dan kondisi lingkungan, seperti dampak program pertanian terhadap kelestarian hutan atau dampak program transportasi terhadap kualitas air sungai. Misalnya, di Kabupaten Gunung Mas, ditemukan bahwa program pembangunan jalan desa yang direncanakan dengan baik dapat meningkatkan aksesibilitas tanpa merusak ekosistem hutan sekitarnya.
- d. Kemampuan Memberikan Rekomendasi yang Tepat Sasaran: Model khusus menghasilkan rekomendasi yang lebih sesuai dengan kondisi lokal Kalimantan Tengah, seperti penyesuaian jadwal program dengan musim tanam padi ladang dan musim panen hasil hutan non-kayu, penguatan peran Dewan Adat dalam pengelolaan program, dan pengembangan bahan pelatihan yang menggunakan bahasa daerah dan contoh kasus lokal.

Perbandingan hasil evaluasi menggunakan model khusus dan model konvensional menunjukkan bahwa model khusus mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan pembangunan di daerah 3T Kalimantan Tengah. Hal ini sesuai dengan temuan Suharto dan Kusuma (2022) yang menunjukkan bahwa metode penelitian campuran yang disesuaikan dengan kondisi lokal menghasilkan temuan yang lebih akurat dan berguna untuk perbaikan kebijakan.

### Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan metode penelitian khusus untuk evaluasi kebijakan publik di daerah 3T Kalimantan Tengah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan. Karakteristik khusus daerah 3T seperti kondisi geografis yang didominasi hutan dan sungai, budaya suku Dayak yang kaya, serta kebutuhan untuk menyeimbangkan pembangunan dengan konservasi lingkungan membuat model evaluasi konvensional tidak selalu efektif dalam menangkap dampak program secara komprehensif.

Pengembangan model analisis dampak khusus yang mencakup dimensi sosial budaya Dayak, keberlanjutan lingkungan, dan kapasitas lokal merupakan langkah penting untuk mengakomodasi kebutuhan khusus daerah 3T Kalimantan Tengah. Model ini tidak hanya mampu mengukur dampak program secara lebih komprehensif, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran untuk perbaikan kebijakan, yang sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pembangunan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat adat. Selain itu, partisipasi masyarakat dan lembaga adat dalam seluruh proses penelitian terbukti sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat lokal. Melibatkan tokoh adat dan Dewan Adat dalam proses penelitian juga membantu dalam memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang sesuai dengan budaya masyarakat dan hasil penelitian mudah diterima oleh masyarakat.

Namun, pengembangan dan penerapan metode penelitian khusus juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam metode penelitian khusus, serta keterbatasan anggaran untuk melakukan penelitian yang melibatkan berbagai metode dan lokasi yang tersebar di kawasan pedalaman yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dan peneliti di Kalimantan Tengah dalam metode penelitian khusus melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, serta penyediaan anggaran yang memadai untuk evaluasi program pembangunan di daerah 3TNamun, pengembangan dan penerapan metode penelitian khusus juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam metode penelitian khusus, serta keterbatasan anggaran untuk melakukan penelitian yang melibatkan berbagai metode dan lokasi yang tersebar di kawasan pedalaman yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dan peneliti di Kalimantan Tengah dalam metode penelitian khusus melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan,

serta penyediaan anggaran yang memadai untuk evaluasi program pembangunan di daerah 3T.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian khusus di daerah 3T Kalimantan Tengah dalam empat aspek utama:

- a. Metode penelitian khusus untuk evaluasi kebijakan publik di daerah 3T Kalimantan Tengah memiliki karakteristik utama berupa fleksibilitas dalam jadwal dan akses, pertimbangan budaya Dayak, integrasi aspek lingkungan, keterpaduan metode, serta partisipasi masyarakat dan lembaga adat
- b. Model analisis dampak khusus yang dikembangkan dalam penelitian ini terdiri dari 5 dimensi utama (aksesibilitas layanan, dampak sosial budaya, keberlanjutan program, kapasitas lokal, dan kepuasan masyarakat) dengan 23 indikator khusus yang sesuai dengan kondisi daerah 3T Kalimantan Tengah, terutama dengan mempertimbangkan budaya Dayak dan prinsip konservasi lingkungan.
- c. Model analisis dampak khusus yang dikembangkan lebih efektif dibandingkan dengan model evaluasi konvensional dalam menangkap dampak program secara komprehensif, mengidentifikasi hambatan khusus daerah 3T Kalimantan Tengah, mengintegrasikan aspek lingkungan, dan memberikan rekomendasi yang tepat sasaran.
- d. Partisipasi masyarakat dan lembaga adat serta pertimbangan kondisi budaya lokal dan lingkungan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan metode penelitian khusus untuk evaluasi kebijakan publik di daerah 3T Kalimantan Tengah

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ekadjati, R. (2022). Metodologi penelitian untuk kebijakan publik di daerah terpencil. Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas. (2022). Rencana pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas 2021–2026. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- Kepala Daerah Kabupaten Lamandau. (2022). Rencana pembangunan daerah Kabupaten Lamandau 2021–2026. Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya. (2022). Rencana pembangunan daerah Kabupaten Murung Raya 2021–2026. Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2022). Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2020). Evaluation: A systematic approach (9th ed.). SAGE Publications.
- Yunus, M., & Prasetyo, B. (2022). Metodologi penelitian kebijakan publik untuk kepentingan khusus. Penerbit LP3ES.

### **Jurnal**

- Bamberger, M., Rugh, J., & Mabry, L. (2021). Real-world evaluation: Working under budget, time, data, and political constraints (4th ed.). SAGE Publications
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). SAGE Publications.

### **Sumber Internet**

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2023). Statistik tahunan provinsi Kalimantan Tengah 2023. BPS Provinsi Kalimantan Tengah.  
<https://bps-kalteng.go.id/publikasi/2023/03/15/statistik-tahunan-provinsi-kalimantan-tengah-2023>
- Dasuki, S., & Hidayat, W. (2023). Evaluasi kebijakan pembangunan di daerah 3T: Tantangan metodologis dan alternatif pendekatan. Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, 18(1), 32–51.

- <https://doi.org/10.24002/jkpi.v18i1.5892>
- Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., & Vermeersch, C. M. J. (2016). Impact evaluation in practice(2nd ed.). World Bank Publications.  
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25039>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). Pedoman evaluasi program pembangunan daerah 3T. Kementerian Dalam Negeri. <https://www.kemendagri.go.id/index.php?page/detail/11987/pedoman-evaluasi-program-pembangunan-daerah-3t>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). Kebijakan konservasi hutan untuk pembangunan berkelanjutan di Kalimantan. Kementerian LHK. <https://www.menlhk.go.id/id/publikasi/kebijakan-konservasi-hutan-untuk-pembangunan-berkelanjutan-di-kalimantan>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024: Bab khusus pembangunan daerah 3T. Bappenas. <https://www.bappenas.go.id/id/publikasi/rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn>
- Mohamad, A., & Siregar, D. (2023). Metode penelitian partisipatif untuk pembangunan di daerah adat: Studi kasus di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 75(2), 112–128. <https://doi.org/10.24002/jai.v75i2.6453>
- Santoso, B., & Wijaya, A. (2023). Pengembangan model analisis dampak sosial budaya untuk program pembangunan di daerah adat Kalimantan Tengah. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 25(2), 78–95. <https://doi.org/10.14203/japp.v25i2.6234>
- Suharto, H., & Kusuma, I. (2022). Metode penelitian campuran untuk evaluasi kebijakan publik di daerah terpencil Kalimantan: Penerapan dan tantangan. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 12(1), 15–32. <https://doi.org/10.24002/jmps.v12i1.5123>
- Supriyanto, E., & Utomo, B. (2023). Indikator keberlanjutan program pembangunan di daerah 3T Kalimantan Tengah: Kajian terhadap kerangka SDGs lokal. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 10(1), 56–73. <https://doi.org/10.24002/jpb.v10i1.6542>